

Daftar Isi

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Daftar Isi | i |
| Pengantar Redaksi | iii-iv |
| Abstrak | v-xvi |
| <i>The Factors Correlate to Family Size in Indonesia</i> oleh: Agung Dwi Laksono dan Ratna Dwi Wulandari..... | 1-13 |
| Profil Sikap Mencari Bantuan Layanan Psikologis pada Mahasiswa oleh: Nurfadilah, Anisa Rahmadani, dan Bahrul Ulum | 15-30 |
| Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo oleh: Yohanes Putut Wibhisana..... | 31-45 |
| Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring oleh: Rahmi Yuningsih | 47-62 |
| Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun | 63-84 |
| Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia oleh: Elga Andina dan Fieka Nurul Arifa..... | 85-105 |
| Pedoman Penulisan | |

Pengantar Redaksi

Jurnal Aspirasi Vol. 12 No. 1 Juni 2021, kali ini menyajikan enam artikel baik dalam bentuk *research article* maupun *review article*. Keenam artikel tersebut telah melalui proses *peer review* mitra bestari dan editorial oleh editor, baik dari sisi bahasa maupun dari teknis penulisan artikel yang dijadikan pedoman Redaksi Jurnal Aspirasi.

Artikel pertama, "*The Factors Correlate to Family Size in Indonesia*," ditulis oleh Agung Dwi Laksono dan Ratna Dwi Wulandari. Artikel tersebut dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkorelasi dengan ukuran keluarga di Indonesia. Data sekunder bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel yang digunakan adalah 34.353 pasangan usia subur. Variabel yang dianalisis meliputi jenis tempat tinggal, kekayaan, perkawinan, lama kohabitasi, kelengkapan jenis kelamin anak, kontrasepsi, umur suami-istri, pendidikan suami-istri, dan pekerjaan suami-istri. Pengujian akhir dilakukan dengan menggunakan regresi logistik biner. Hasilnya menunjukkan pasangan di daerah perkotaan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 dibandingkan pasangan yang tinggal di daerah perdesaan. Semakin baik status kekayaan maka semakin tinggi kemungkinan memiliki ukuran keluarga ≤ 4 . Semakin lama kohabitasi maka semakin kecil kemungkinan memiliki ukuran keluarga ≤ 4 .

Artikel kedua, "Profil Sikap Mencari Bantuan Layanan Psikologis pada Mahasiswa," ditulis oleh Nurfadilah, Anisa Rahmadani, dan Bahrul Ulum ditujukan untuk mendapatkan gambaran tentang sikap mahasiswa dalam mencari bantuan psikologis pada perguruan tinggi. Penelitian *mixed method* ini dilakukan di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner *Attitude Toward Seeking Professional Psychological Help* terhadap 180 orang mahasiswa, sedangkan data kualitatif diperoleh menggunakan wawancara dengan format semi terbuka terhadap 12 orang mahasiswa via telepon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap mahasiswa cenderung netral dalam mencari bantuan psikologis; mahasiswa bahkan kurang familier dengan keberadaan layanan psikologis, dan memiliki stigma negatif terhadap layanan psikologis; dan belum efektifnya kampanye layanan psikologis yang telah dilakukan.

Artikel ketiga, "Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo," ditulis oleh Yohanes Putut Wibhisana. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri dari pihak pemerintah kabupaten, perangkat desa, komunitas pariwisata, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata yang menggunakan skema *community-based tourism* memberikan dampak positif, di mana ada kemajuan pola pikir ekonomi, penambahan mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan, serta perubahan cara dan perilaku kerja.

Artikel keempat, “Pelindungan Kesehatan Masyarakat terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring,” ditulis oleh Rahmi Yuningsih, ditujukan untuk mengkaji upaya pelindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan daring dari perspektif peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah memiliki sumber daya terbatas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan daring yang tidak mengenal batas geografi. Pihak swasta berperan dalam membuat program terintegrasi yang mendukung kebijakan dan memperhatikan hak-hak konsumen. Masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kepada pihak lokapasar maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk ilegal. RUU POM diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, termasuk yang diedarkan secara daring.

Artikel kelima, “Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan,” ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun. Artikel ini mendeskripsikan perkembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), kendala-kendala dan permasalahan pengembangannya, dan apakah PLTSa dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan listrik atau mengatasi masalah lingkungan. Melalui penelitian kualitatif, diketahui 1 PLTSa sudah beroperasi secara komersial (di Surabaya), 2 PLTSa dalam tahap konstruksi (di Surakarta dan DKI Jakarta), 2 PLTSa dalam tahap sudah ada pengembang (di Palembang dan Tangerang), dan sisanya masih dalam tahap lelang, *Pre-Feasibility Study*, *Outline Business Case*, atau *Final Business Case*. Lambatnya pembangunan PLTSa terjadi karena tingginya *tipping fee*, anggaran pemerintah daerah terbatas, over estimasi potensi listrik dari sampah, keterbatasan sumber daya manusia yang kapabel, tingginya harga jual listrik PLTSa, tidak adanya insentif bagi pengembang, dan tidak adanya jaminan *bankable* untuk investasi. PLTSa termal merupakan solusi instan mengatasi permasalahan lingkungan untuk kota dengan produksi sampah di atas 1.000 ton/hari dan keterbatasan lahan untuk TPA.

Artikel keenam, “Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia,” ditulis oleh Elga Andina dan Fieka Nurul Arifa. Artikel bertujuan untuk menjelaskan strategis rekrutmen guru dengan PPPK yang dipandang dapat menyelesaikan persoalan yang lahir di lingkungan guru, di antaranya tata kelola guru, isu guru honorer, dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik oleh ASN. Data diperoleh dari kegiatan rapat *stakeholder* terkait dengan Komisi X DPR RI selama bulan Januari 2021 dilengkapi data sekunder dari media massa dan webinar yang membahas mengenai isu rekrutmen guru PPPK. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu ada perbaikan menyeluruh dalam sistem seleksi dan rekrutmen guru, pertama, berdasarkan kebutuhan; kedua, calon guru diproduksi oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan ketiga, mengutamakan kompetensi dan kualifikasi.

Demikianlah sekilas gambaran enam artikel yang disajikan dalam Jurnal Aspirasi Vol. 12 No. 1 Juni 2021. Kami berharap semoga artikel-artikel tersebut dapat menambah wawasan pembaca. Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2021
Redaksi

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (*print*)
ISSN: 2614-5863 (*electronic*)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Agung Dwi Laksono

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Ratna Dwi Wulandari

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ukuran Keluarga di Indonesia

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

halaman 1–13

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2066

Abstrak

Beberapa suku di Indonesia memiliki budaya keluarga besar yang sangat kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkorelasi dengan ukuran keluarga di Indonesia. Studi memanfaatkan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2017. Sampel yang digunakan adalah 34.353 pasangan usia subur. Variabel yang dianalisis meliputi jenis tempat tinggal, kekayaan, perkawinan, lama kohabitasi, kelengkapan jenis kelamin anak, kontrasepsi, umur suami-istri, pendidikan suami-istri, dan pekerjaan suami-istri. Pengujian akhir dengan regresi logistik biner. Hasilnya menunjukkan pasangan di daerah perkotaan lebih kecil kemungkinannya untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 dibandingkan pasangan yang tinggal di daerah perdesaan. Semakin baik status kekayaannya maka semakin tinggi kemungkinan memiliki ukuran keluarga ≤ 4 . Semakin lama kohabitasi maka semakin kecil kemungkinan memiliki ukuran keluarga ≤ 4 . Pasangan yang sudah memiliki jenis kelamin anak lengkap kemungkinannya 0,148 kali dibandingkan dengan yang tidak lengkap untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 . Pemakaian alat kontrasepsi memiliki probabilitas 0,727 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak menggunakannya untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 . Suami yang berpendidikan dasar 1,242 kali lebih mungkin untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 dibanding keluarga dengan suami tidak berpendidikan. Usia istri menjadi faktor penentu ukuran keluarga. Pasangan dengan istri yang bekerja 1,273 kali lebih mungkin dibandingkan mereka yang tidak bekerja untuk memiliki ukuran keluarga ≤ 4 . Hasil penelitian menyimpulkan bahwa delapan variabel merupakan faktor-faktor yang memengaruhi ukuran keluarga pada pasangan usia subur di Indonesia. Delapan faktor tersebut adalah jenis tempat tinggal, status kekayaan, lama kohabitasi, jenis kelamin anak lengkap, penggunaan kontrasepsi, pendidikan suami, usia istri, dan status pekerjaan istri.

Kata Kunci: data kependudukan; keluarga berencana; melahirkan anak; ukuran keluarga

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (print)
ISSN: 2614-5863 (electronic)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Nurfadilah

Universitas Al Azhar Indonesia

Anisa Rahmadani

Universitas Al Azhar Indonesia

Bahrul Ulum

Universitas Al Azhar Indonesia

Profil Sikap Mencari Bantuan Layanan Psikologis pada Mahasiswa

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

halaman 15–30

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2030

Abstrak

Hasil survei Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa masih tidak memahami maksud dari layanan kesehatan mental. Sementara hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyatakan bahwa penanganan kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang sikap mahasiswa dalam mencari bantuan psikologis pada perguruan tinggi. Penelitian *mixed method* ini dilakukan di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI). Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner *Attitude Toward Seeking Professional Psychological Help* terhadap 180 orang mahasiswa, sedangkan data kualitatif diperoleh menggunakan wawancara dengan format semi terbuka terhadap 12 orang mahasiswa via telepon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap mahasiswa cenderung netral dalam mencari bantuan psikologis; mahasiswa bahkan kurang familiar dengan keberadaan layanan psikologis, dan memiliki stigma negatif terhadap layanan psikologis; dan belum efektifnya kampanye layanan psikologis yang telah dilakukan. Demi tercapainya mahasiswa yang sehat fisik dan mental maka artikel ini menyarankan beberapa hal. *Pertama*, amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa harus dibuatkan peraturan turunan pada tingkat penyelenggaraan universitas melalui peraturan menteri yang menangani pendidikan tinggi, yang di dalamnya mengamanatkan agar universitas menyusun strategi penyelenggaraan unit layanan psikologis remaja yang berkesinambungan, implementatif, komprehensif, dan terintegrasi dengan sumber-sumber dukungan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. *Kedua*, Komisi X DPR RI sebaiknya mengawal proses pembentukan aturan turunan tersebut dan mengawasi pelaksanaannya.

Kata Kunci: kesehatan mental; layanan psikologis; profil mencari bantuan; sikap mahasiswa

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (*print*)
ISSN: 2614-5863 (*electronic*)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Yohanes Putut Wibhisana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

**Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas
dalam Program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo**

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

halaman 31–45

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.1741

Abstrak

Kemiskinan cukup erat kaitannya dengan kondisi perdesaan, terlebih jika membandingkan pola kehidupan masyarakat perdesaan dan perkotaan, pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia (SDM). Sudah sepatutnya saat ini masyarakat menjadi subjek dalam setiap program pengentasan kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan proses pemberdayaan masyarakat melalui program Desa Wisata Jogoboyo Purworejo dengan melihat strategi perencanaan dan pengembangan kawasan wisata serta melihat dampak yang muncul dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki berbagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan, salah satunya adalah program pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri dari pihak pemerintah kabupaten, perangkat desa, komunitas pariwisata, dan warga setempat. Hasil penelitian menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat berjalan dengan cukup baik. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata yang menggunakan skema *community-based tourism* memberikan dampak positif, di mana ada kemajuan pola pikir ekonomi, penambahan mata pencaharian baru, peningkatan pendapatan dan pengelolaan keuangan, serta perubahan cara dan perilaku kerja. Namun demikian, perlu upaya untuk meningkatkan SDM lokal dalam pemanfaatan media sosial dengan konten yang menarik perhatian wisatawan. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa setempat yang menerima program dan komunitas yang bergerak di bidang pariwisata juga diperlukan.

Kata Kunci: desa wisata; pariwisata berbasis masyarakat; pemberdayaan masyarakat

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (*print*)
ISSN: 2614-5863 (*electronic*)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Rahmi Yuningsih

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

**Pelindungan Kesehatan Masyarakat
terhadap Peredaran Obat dan Makanan Daring**

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

halaman 47–62

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2020

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada meningkatnya kegiatan jual beli obat dan makanan daring di tengah masyarakat. Pandemi Covid-19 mengubah cara masyarakat mendapatkan obat dari cara konvensional menjadi daring. Namun, tidak semua obat dan makanan yang diedarkan daring memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat. Sementara itu, kebijakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang diedarkan daring tersebar dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam implementasinya, suatu kebijakan publik memerlukan peran dari pihak birokrasi (pemerintah), pihak swasta, dan kelompok masyarakat. Tulisan ini mengkaji upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap peredaran obat dan makanan daring dari perspektif peran pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan. Pemerintah memiliki sumber daya terbatas dalam mengawasi peredaran obat dan makanan daring yang tidak mengenal batas geografi. Pihak swasta berperan dalam membuat program terintegrasi yang mendukung kebijakan dan memperhatikan hak-hak konsumen. Masyarakat juga berperan dalam meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kepada pihak lokapasar maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk ilegal. Saran perbaikan kebijakan, antara lain: perlu peningkatan sosialisasi peraturan; pembuatan peraturan teknis dan standar pelayanan kefarmasian dalam peredaran daring obat; peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi; peningkatan sumber daya BPOM; dan peningkatan peran lokapasar dalam menyaring setiap produk yang dijual. Selain itu, mempercepat pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) yang masuk Prolegnas Prioritas 2021. RUU POM diharapkan menjadi payung hukum dalam pengawasan obat dan makanan termasuk peredaran daring.

Kata Kunci: obat ilegal; pengawasan obat dan makanan; peredaran daring

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (*print*)
ISSN: 2614-5863 (*electronic*)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Sri Nurhayati Qodriyatun

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah: Antara Permasalahan Lingkungan dan Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

halaman 63–84

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2093

Abstrak

Pemerintah berupaya mendorong pemanfaatan energi terbarukan, salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Upaya mempercepat pembangunan PLTSa dilakukan melalui Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Namun, hingga 6 Mei 2021 hanya satu PLTSa telah beroperasi secara komersial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan pembangunan PLTSa, kendala-kendala dan permasalahan pengembangannya, dan apakah PLTSa solusi pemenuhan kebutuhan listrik atau mengatasi masalah lingkungan. Melalui penelitian kualitatif, diketahui 1 PLTSa sudah beroperasi secara komersial (di Surabaya), 2 PLTSa dalam tahap konstruksi (di Surakarta dan DKI Jakarta), 2 PLTSa dalam tahap sudah ada pengembang (di Palembang dan Tangerang), dan sisanya masih dalam tahap lelang, *Pre-Feasibility Study*, *Outline Business Case*, atau *Final Business Case*. Lambatnya pembangunan PLTSa terjadi karena tingginya *tipping fee*, anggaran pemerintah daerah terbatas, over estimasi potensi listrik dari sampah, keterbatasan sumber daya manusia yang kapabel, tingginya harga jual listrik PLTSa, tidak adanya insentif bagi pengembang, dan tidak adanya jaminan *bankable* untuk investasi. PLTSa termal merupakan solusi instan mengatasi permasalahan lingkungan untuk kota dengan produksi sampah di atas 1.000 ton/hari dan keterbatasan lahan untuk TPA. Untuk itu, perlu ada dukungan regulasi melalui RUU EBT mengenai harga jual listrik PLTSa yang bersaing, insentif bagi pengembang PLTSa, dan jaminan *bankable* untuk investasi PLTSa. Selain itu, perlu ada perhitungan secara cermat potensi energi dari sampah, alokasi APBD minimal 2–3% untuk pengelolaan sampah, dan menyiapkan sumber daya manusia yang kapabel, menyediakan sarana prasarana pengumpulan dan pengangkutan sampah yang memadai, dan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah.

Kata Kunci: energi terbarukan; pemanfaatan sampah untuk energi; PLTSa

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (*print*)
ISSN: 2614-5863 (*electronic*)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Elga Andina

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Fieka Nurul Arifa

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Problematika Seleksi dan Rekrutmen Guru Pemerintah di Indonesia

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

halaman 85–105

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2101

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia hingga saat ini belum lepas dari persoalan tata kelola guru, guru honorer, dan reformasi birokrasi yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan iklim kerja di dalamnya. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan untuk mengubah sistem rekrutmen guru pegawai pemerintah dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dalam pelaksanaannya masih menyisakan beberapa masalah dan pro kontra berbagai pihak. Penelitian kualitatif ini menggunakan data rapat *stakeholder* terkait dengan Komisi X DPR RI selama bulan Januari 2021 dilengkapi data sekunder dari media massa dan webinar yang membahas mengenai isu rekrutmen guru PPPK guna menjawab pertanyaan: bagaimana strategi rekrutmen guru dengan PPPK dapat menyelesaikan permasalahan (1) perbaikan tata kelola guru; (2) penyelesaian isu guru honorer; dan (3) reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh ASN? Dapat disimpulkan bahwa perlu ada perbaikan total dalam sistem seleksi dan rekrutmen guru, yaitu: (1) berdasarkan kebutuhan; (2) calon guru diproduksi oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; dan (3) mengutamakan kompetensi dan kualifikasi.

Kata Kunci: guru PPPK; reformasi birokrasi; seleksi dan rekrutmen; tata kelola guru

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (print)
ISSN: 2614-5863 (electronic)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Agung Dwi Laksono

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

Ratna Dwi Wulandari

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

The Factors Correlate to Family Size in Indonesia

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 June 2021

pp. 1–13

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2066

Abstract

Some tribes in Indonesia have a big family culture. The study aimed to analyze factors that correlate to family size in Indonesia. The study employed secondary data from the 2017 Indonesia's Demographic and Health Survey. The samples used were 34,353 childbearing age couples. The variables analyzed included type of residence, wealth, marital, cohabitation duration, complete child gender, contraceptive, age of husband-wife, education of husband-wife, and occupation of husband-wife. Final test by binary logistic regression. The results show that couples in urban areas are less likely to have a family size ≤ 4 than couples who live in rural areas. The better the wealth status, the higher the possibility to have a family size ≤ 4 . The longer the cohabitation period, the lower the possibility of having a family size ≤ 4 . Couples who already have complete child gender were 0.148 times more likely to have a family size < 4 than couples with incomplete child gender. The contraceptives use has a probability of 0.727 times more than those not using it to have a family size ≤ 4 . The husband with primary education was 1.242 times more likely than the husband with no education to have a family size ≤ 4 . The study found that a wife's age correlated to family size. Couples with employed wives were 1.273 times more likely than those not employed to have a family size ≤ 4 . The study concluded that eight variables correlated to family size among childbearing age couples in Indonesia: residence, wealth, cohabitation duration, complete child gender, contraceptive use, husband's education, wife's age, and wife's employment.

Keywords: *childbearing; family planning; family size; population data*

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (print)
ISSN: 2614-5863 (electronic)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Nurfadilah

Universitas Al Azhar Indonesia

Anisa Rahmadani

Universitas Al Azhar Indonesia

Bahrul Ulum

Universitas Al Azhar Indonesia

The Profile of Psychological Help-Seeking Attitude on Students

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 June 2021

pp. 15–30

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2030

Abstract

The results of a survey by the Indonesian Psychology Student Association (ILMPI) show that students still do not understand the meaning of mental health services. Meanwhile, the results of the 2018 Basic Health Research stated that handling mental health is as important as physical health. Therefore, it is necessary to conduct research to get a picture of the attitudes of students in seeking psychological assistance in colleges. This mixed methods research was conducted at the University of Al Azhar Indonesia (UAI). Quantitative data was collected using a questionnaire on the attitude of seeking professional psychological assistance to 180 students, while the qualitative data were obtained using semi-open interviews with 12 students via telephone. The results showed that the students' attitudes tended to be neutral in seeking psychological help; students are even less familiar with the existence of psychological services and have a negative stigma against psychological services, and the psychological service campaign that has been carried out is ineffective. In order to create students who are healthy physically and mentally, therefore, this article suggests some points. First, as mandated by Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health, derivative regulations must be made at the level of ministerial regulation which mandates that universities should develop a strategy for the implementation of sustainable, implementative, comprehensive, and integrated youth psychological service units in universities. Second, Commission X DPR RI should oversee the process of forming these derivative regulations and supervise their implementation.

Keywords: *college student attitudes; mental health; psychological services; seeking help profile*

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (print)
ISSN: 2614-5863 (electronic)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Yohanes Putut Wibhisana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

***People and Community Empowerment
in the Jogoboyo Purworejo Tourism Village Program***

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 June 2021

pp. 31–45

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.1741

Abstract

Poverty is quite closely related to rural conditions, especially when comparing the life patterns of rural and urban communities, infrastructure development, and human resources. It is time for the people to become the subject of any poverty alleviation program. This paper aims to describe the process of community empowerment through the Jogoboyo Purworejo Tourism Village program by looking at planning strategies and developing tourist areas and seeing the impacts that arise in the development of these tourist areas. Purworejo Regency has various efforts to reduce poverty, one of which is a community empowerment program through tourism villages. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. Data collection used in-depth interviews with six informants consisting of the district government, village officials, the tourism community, and local residents. The results showed that the community empowerment process was running quite well. Furthermore, community empowerment through the tourism village program that uses the community-based tourism scheme has a positive impact, where there is progress in the economic mindset, increasing new livelihoods, increasing income and financial management, as well as changes in work methods and behavior. However, efforts are needed to improve local human resources in the use of social media with content that attracts tourists. In addition, good coordination between local governments and local village communities that receive programs and communities engaged in tourism is also needed.

Keywords: *community-based tourism; community empowerment; tourism villages*

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (print)
ISSN: 2614-5863 (electronic)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Rahmi Yuningsih

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Public Health Protection Against Online Drugs and Food Circulation

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 June 2021

pp. 47–62

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2020

Abstract

Information and communication technology has had an impact on the food and drug online market. However, not all food and drugs in the online market have permits and other requirements that can threaten public health. Against something that is detrimental to society and requires protection from the government, it requires public policy to overcome. In the implementation, public policy requires the role of the bureaucracy, the private sector, and community groups. This paper examines efforts to protect public health against online markets of food and drug from the perspective of the roles of the government, the private sector, and the community. The research approach used is qualitative with a descriptive analysis method. The data collection technique was carried out by means of a literature study. The government has limited resources in monitoring online markets that do not recognize geographic boundaries. The private sector has a role in creating integrated programs that support policies and pay attention to consumer rights. The community also plays a role in increasing awareness and reporting to the marketplace and BPOM on illegal products. Several suggestions, among others, need to increase the socialization of regulations; making technical regulations and pharmaceutical service standards in the online market of drugs; improvement of communication, information, and education; increasing The National Drug and Food Control resources and increasing the role of the marketplace in filtering every product sold. In addition, it will accelerate the discussion of the drug and food control draft which is included in the Prolegnas 2021.

Keywords: *food and drug control; illegal drug; online market*

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (*print*)
ISSN: 2614-5863 (*electronic*)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Sri Nurhayati Qodriyatun

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

***Waste to Energy Power Plant: Between Environmental Issue
and the Acceleration of Renewable Energy Development***

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 June 2021

pp. 63–84

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2093

Abstract

The government is trying to encourage the use of renewable energy, one of which is from waste to energy power plant. Efforts to accelerate the development of the plant are carried out through Presidential Regulation Number 35 of 2018. However, only one plant has been operating commercially since May 6th, 2021. This study aims to describe the development, the obstacles, and whether the plant is a solution to meet electricity needs or environmental problems. Through qualitative research, we found that the plant in Surabaya has been operating commercially; the plants in Surakarta and DKI Jakarta are in the construction stage; the plants in Palembang and Tangerang are in the stage of confirming the developer, and the rest are still on auction stage, Pre-Feasibility Study, Outline Business Case, or Final Business Case. The high tipping fee, limited local government budget, overestimation of potential for waste as electricity, limited competent human resources, the high selling price of the plant electricity, and no bankable guarantee for investment are obstacles to the plant development. The thermal plant is an instant solution for cities with above 1.000 ton/day waste and limited land for landfills. In the future, there should be regulatory support through the Renewable Energy Bill to overcome the obstacles. In addition, there should be a careful calculation of the energy potential of waste, a minimum budget allocation of 2–3% for waste management and preparing capable human resources, providing adequate waste collection and transportation infrastructure, and educating the public on sorting waste.

Keywords: *renewable energy; waste power plant; waste to energy*

ASPIRASI
Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 Juni 2021

ISSN: 2086-6305 (print)
ISSN: 2614-5863 (electronic)

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin dan biaya.

Elga Andina

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Fieka Nurul Arifa

Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Problematic of Selection and Recruitment of Government Teachers in Indonesia

Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial

Volume 12, No. 1 June 2021

pp. 85–105

doi: 10.46807/aspirasi.v12i1.2101

Abstract

To date, the implementation of education in Indonesia could not be separated from the problems of teacher governance, non-permanent or honorary teachers, and bureaucratic reforms that affect the quality of education and the working climate within. In an effort to improve the quality of public services by the State Civil Apparatus (ASN), the Ministry of Education and Culture agrees with the Ministry of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform, as well as the Ministry of Finance to change the recruitment system for government teachers from the recruitment of Candidates for Civil Servants (CPNS) to the recruitment of Government Employees with Work Agreements (PPPK), which in its implementation still leaves several problems with various parties' pros and cons. This qualitative research uses data from related stakeholders meetings with Commission X DPR RI on January 2021, supported by secondary data from mass media and webinars that discuss the issue of PPPK teachers' recruitment to answer the following question: how can teachers' recruitment strategy with PPPK solve the problems of (1) improvement of teachers' management; (2) solving the issue of honorary teachers; and (3) bureaucratic reform by improving the quality of public services by the State Civil Apparatus (ASN)? It can be concluded that there is a need for a total improvement in the teacher selection and recruitment system, namely (1) based on need; (2) candidates are produced by Teachers Training Institution in supply to field's demand; (3) prioritizing competence and qualifications.

Keywords: *bureaucratic reform; PPPK teachers; selection and recruitment; teacher governance*